

MANFAAT PELAKSANAAN “DIPLOMASI WARGA” DI INDONESIA

Setyasih Harini¹

Abstract

This article discuss how diplomacy has been conducted by the increasing participation of the public in diplomatic activities. Communication technology can wider opportunity of citizen to make relations with another. In practice citizen diplomacy could not be easily differentiated from public diplomacy. Both of them still involvement of non-state actors (person, organization or public community) to increase the credibility of state's diplomacy. Participation of citizen to make relationship with another from other countries also increase understanding each national identity. Citizen diplomacy still sees the participation of the public to support the government's diplomacy. There are five typology of citizen diplomats from Paul Sharp to identify actors in citizen diplomacy and their forms of participation. Impact of this citizen diplomacy was very useful to developing countries. To sum up of this article, citizen diplomacy can be a method in conducting international relations through three criteria: participation of citizen, complementary to statebased diplomacy and requires non-state actors' possession of global awareness.

Keywords: *citizen diplomacy, participation, citizen*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi memberikan ruang bagi publik untuk memiliki sikap politik yang berbeda dengan negara dan mengekspresikannya secara langsung terhadap publik di luar negara. Peran aktor non negara dalam diplomasi sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang yakni sejak tahun 1981 oleh Joseph Montville dengan memperkenalkan konsep “*track two*” diplomacy (jalur kedua diplomasi). Konsep tersebut merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor di luar pemerintah untuk meredam potensi konflik atau upaya-upaya mendukung diplomasi pemerintah. Menurut Jos Havermas (1999), “*track two*” atau jalur kedua non-pemerintah memiliki perbedaan dengan jalur pertama. Hal ini disebabkan karena pada “*track two*” lebih memainkan peran dalam proses untuk membangun saling pengertian antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada di luar negeri sementara jalur pertama terbatas pada sejumlah kecil diplomat

¹ Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
Email: setyasih.rini@gmail.com

sebagai agen perwakilan resmi suatu negara di negara lain. Artikel ini mengulas tentang konsep *citizen diplomacy* yang dikemukakan oleh para ahli sebagai peluang partisipasi warga untuk mendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah. Kedua, ulasan mengenai lima tipologi para diplomat warga atau *citizen diplomats*. Ketiga, adalah kriteria dari *citizen diplomacy* dalam studi hubungan internasional yang didalamnya salah satunya mensyaratkan adanya partisipasi warga yang memiliki kesadaran global.

Diplomasi Warga Sebagai Tren Baru Dalam Hubungan Internasional

Kegiatan yang dikenal sebagai diplomasi warga (*citizen diplomacy*) bisa dikatakan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya keterlibatan warganegara dalam melakukan hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan warganegara dalam aktivitas diplomasi umumnya tanpa disadari oleh warga itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan warga mengenai diplomasi yang selama ini hanya dilakukan di tingkat pusat (pemerintah). Mengutip definisi tentang diplomasi warga dari Sherry Mueller (Dian Mutmainah, 2014) bahwa peran individu adalah komplementer terhadap diplomasi yang dilakukan oleh negaranya. Dikatakan komplementer karena individu memiliki hak dan kewajiban untuk membantu pembentukan atau terjalinnya hubungan luar negeri yang menguntungkan negaranya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh Mueller kondisi demikian diistilahkan sebagai proses “*One Hand at a Time*” sebab dalam aktivitas diplomasi warga tersebut sebenarnya berlangsung kontak atau komunikasi yang lebih intensif secara personal antarwarga negara dari satu negara dengan negara lain. Interaksi yang terjalin antara dua warganegara yang berbeda negaranya dimaknai seperti sebuah proses “jabat tangan” jika dilihat secara nyata yang dalam pelaksanaannya dapat membantu atau mendukung hubungan yang dilakukan oleh negaranya dengan negara lain.

Adapun maksud dari pelaksanaan sebagai kontak antarwarga negara tersebut dapat membantu pemerintah untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan memberikan pemahaman atas perbedaan yang ada pada tataran

grassroot. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa relasi antarwarganegara dipandang perlu dan mampu menjembatani dan melengkapi peran pemerintah yang belum terjangkau dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Dalam pemaknaan diplomasi warga yang disampaikan oleh Mueller di atas lebih menunjukkan peran warga yang bisa dilakukan secara sporadis sebagai bentuk partisipasinya terhadap pemerintah demi tercapainya kepentingan nasional melalui hubungan luar negeri.

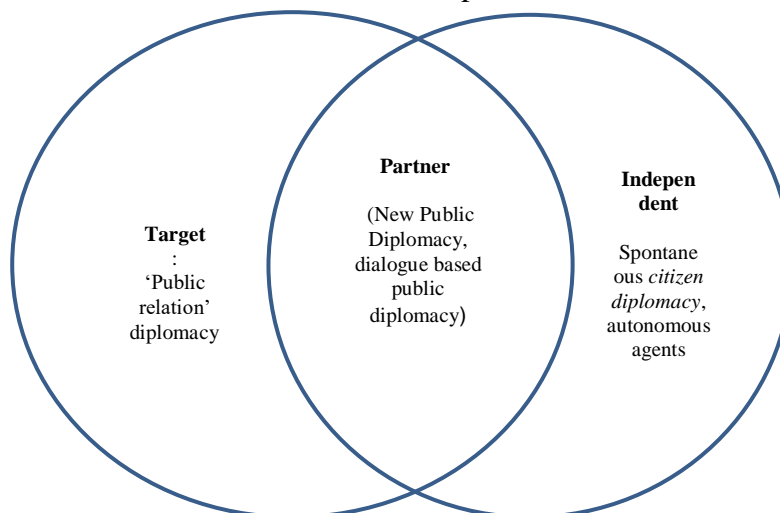
Sementara itu konsep diplomasi warga dari James Marshall lebih menekankan pada pemberian otonomi kepada warganegara dalam penanganan masalah luar negeri yang selama ini didominasi oleh pemerintah. Marshall sekaligus menggarisbawahi bahwa jika publik belum dapat berperan secara aktif dalam membantu atau mendukung pemerintah untuk urusan luar negeri menunjukkan bahwa demokratisasi belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya peran warga tersebut tidak terlepas dari pengawasan negara sebab aktor-aktor di dalamnya adalah mereka yang benar-benar diijinkan oleh negaranya, yang diistilahkan dengan *hand picked* (Dian Mutmainah, 2014). Pemikiran Marshall inilah yang kemudian menjadi kontradiksi antara apa yang diperlukan dengan apa yang berlaku dalam proses penyelesaian mengingat permasalahan kemanusiaan yang tercipta dari hubungan luar negeri terkadang tidak bisa ditangani oleh teknokrat (Havermans, Joss. 1999). Ditambahkan Hoffman dan Graham (2006) bahwa sebagai warisan pandangan dari negara-kota Yunani. Menurutnya, status warga (*citizen*) menempel pada laki-laki dewasa anggota masyarakat yang mampu dan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam ranah pemerintah selebihnya dari itu hanyalah kaum miskin, budak, orang asing termasuk pengungsi, perempuan dan anak-anak. Odoh dan kawan-kawan mengutip pendapat dari Marx dan Engels bahwa menurut kaum Marxis, konsep warganegara merujuk sebagai instrumen anti-sosial yang melakukan eksploitasi dan alinasi. Kelompok ini juga memisahkan diri dari masyarakat lainnya. Sebagai akibatnya adalah negara mempercayai pemilik bisnis properti untuk mewakili kepentingan warga di luar negeri (Odoh, 2014).

Menurut Marshall, diplomasi warga justru menimbulkan kenisbian bagi

para praktisi tradisional dalam ranah diplomasi mengingat peran dan tugas seorang diplomat tidaklah mungkin tergantikan oleh awam. Masyarakat awam masih dipandang tidak mampu untuk memutuskan atau mengeksekusi suatu keputusan terhadap permasalahan yang terjadi dalam hubungan luar negeri dan dipandang sebagai hasil untuk merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan kata lain, konsep diplomasi warga bagi Marshall belum bisa menempatkan awam atau publik sebagai aktor tunggal dalam pelaksanaan diplomasi namun masih membutuhkan pendampingan, pengawasan dan koordinator dari pemerintah sebagai elemen negara khususnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Lebih lanjut Marshall juga berargumen bahwa publik yang terlibat dalam urusan luar negeri merupakan inisiatif dari warga sendiri. Warga-negara bentuk partisipasinya terhadap pemerintah demi tercapainya kepentingan nasional melalui hubungan luar negeri.

Kegiatan yang dikenal sebagai diplomasi antarwarganegara tersebut juga bisa dikatakan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya keterlibatan warganegara dalam pelaksanaan diplomasi. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan warganegara dalam berdiplomasi tentu saja tidak terlepas dari peran negara sebagai pelindung dan koordinatornya. Hal ini cukup beralasan mengingat pelaksanaan diplomasi sebenarnya merupakan jalur yang harus ditempuh oleh pemerintah sebagai perwakilan suatu negara. Aktor domestik non negara perannya dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu, target, partner dan independen. Dua kategori pertama biasanya ditemukan dalam studi diplomasi publik yang masih memberikan ruang besar bagi negara baik dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kegiatan. Kategori ketiga ditemukan dalam studi diplomasi warga yang secara konseptualpun masih banyak menghadirkan negara di dalamnya (Insanally, Rudy, 2013). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar. 1
Dimensi Domestik dalam Studi Diplomasi



Sementara itu Paul Sharp (2001) justru kurang optimis jika ada gagasan yang menyatakan bahwa publik yakni warga negara biasa mampu menjalankan aktivitasnya layaknya seorang diplomat. Dalam penjelasannya yang dimuat dalam artikel yang berjudul *Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota as International Actors*, Sharp meragukan klaim dari *The British Foreign Policy Centre*. Lembaga tersebut secara tegas menyebutkan bahwa seluruh warga negara Inggris yang disebut dengan istilah “60 million budding ambassadors” adalah *citizen diplomats*.

Tipologi Diplomasi Warga

Tipologi para diplomat warga yang dilakukan oleh Paul Sharp (2001) berdasarkan pada hal yang paling mendasar mengenai fungsi diplomat sebagai agen atau lembaga perwakilan negara. Ada dua dimensi yang menjadi penekanan mengenai tipologi diplomat warga menurut Paul Sharp. Kedua dimensi tersebut adalah siapa atau apa yang diwakili oleh diplomat warga dan kepada siapa diplomasi itu ditujukan. Dari kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa kriteria pertama tertuju pada pihak yang diwakili oleh diplomat warga itu yang bisa tertuju pada (siapa) yakni aktor pelakunya maupun (apa) sebagai gagasan atau pesan yang dibawa oleh aktor tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud dalam

penjelasan ini adalah diri sendiri aktor tersebut, institusi kolektif seperti sub-state, supra-state, dan komunitas trans-state; mungkin juga Negara berdaulat pada saat tertentu (*on occasion*). Di sini juga bisa dipahami sebagai bidang tertentu yang memiliki tujuan atau kepentingan sama (*single purpose*) atau bisa jadi diplomat warga sendiri yang bertindak mewakili gagasan maupun kebijakan tertentu. Selain itu aspek kedua dalam gagasan Sharp mengacu pada perwakilan dari komunitas internasional yang menjadi target diplomasinya, bisa aktor Negara atau non-negara. Dari penjelasan tipologi yang dikemukakan oleh Paul Sharp tersebut menunjukkan kedalaman pemahamannya mengenai diplomasi warga dibandingkan dengan Sherry Mueller dan James Marshall. Sebab dalam gagasan Paul Sharp mengenai diplomasi warga bukan hanya menekankan pada bentuk partisipasi atau keterlibatan warga dalam melakukan diplomasi tetapi juga melihat aktivitas internasional atau transnasional dari warga tersebut.

Selanjutnya Paul Sharp membagi diplomat warga sebagai pelaku dalam diplomasi warga ke dalam lima tipe. Pada tipologi pertama, diplomasi dimaknai sebagai metode komunikasi antar-negara yang didalamnya melihat diplomat warga berperan sebagai perantara antara negara dengan negara. Dalam hal ini Sharp menyebutnya *citizen diplomat as a go-between messenger* yang berlaku misalnya untuk dua Negara yang sedang berada pada situasi konflik atau ketegangan dalam melakukan hubungan diplomatik atau dalam situasi pasca konflik (2001). Ketika hubungan dua negara sedang mengalami ketegangan atau pasca konflik, relasi yang terjalin diantara warga negara dalam menjalankan aktivitas diplomasi dapat membantu pemerintah untuk menghindarkan diri dari tindakan dipermalukan dan dapat menggunakan keahlian personal yang dimiliki warga negara untuk menjalankan misi tertentu. Hal ini bisa dilihat dari peran warga Norwegia dalam membangun "*back channel*" antara warga Israel dan Palestina pada tahun 1990-an. Aktivitas warga Norwegia tersebut menjadi embrio dari negosiasi resmi perdamaian Timur Tengah yang disponsori AS.

Tipologi kedua mengacu pada peran aktor sub-negara sebagai inisiator yang menggalang terselenggaranya komunikasi internasional untuk memperjuangkan

tercapainya kepentingan di tingkat lokal. Dalam hal ini Sharp (2001) menyebutnya sebagai *the citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*. Para diplomat warga dalam tipologi kedua ini dapat berperan sebagai perwakilan kepentingan ekonomi dalam berbagai tingkatan (teritorial) maupun dalam lingkup sektoral. Konsultan profesional dan anggota komunitas di dalamnya berperan sebagai aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran tersebut. Adapun contoh yang diberikan oleh Paul Sharp dalam tipologi kedua ini adalah terbangunnya pusat pengembangan software di Kota Duluth. Pembangunan gedung itu sebagai bukti keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh delegasi dari Duluth ke kota Vaxjo di Swedia. Pada waktu itu delegasi dari kota Duluth mengunjungi Vaxjo atas undangan dari *Vaxjo Chamber of Commerce* yang merupakan partner dalam kerjasama *Sister City*. Dalam kunjungan tersebut delegasi Duluth berkesempatan mengunjungi dua kota tetangga Vaxjo sekaligus yakni Ronneby dan Karlskrona. Kedua kota ini telah sukses dalam membangun pusat pengembangan *software* untuk mengganti industri logamnya yang menurun. Berkat negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan dari Kota Duluth tersebut pemerintah dari kedua kota tersebut menyetujui untuk memberi *franchise* dan *mentoring* bagi Duluth untuk mengembangkan pusat pengembangan *software*.

Selanjutnya adalah tipologi yang ketiga mengacu pada aktivitas individu untuk memperjuangkan gagasan tertentu. Adapun gagasan di sini terfokus pada suatu isu yang membuat kelompok atau komunitas dalam suatu negara untuk mendorong institusi kenegaraan maupun internasional untuk mengubah kebijakan yang telah diambil. Dalam hal ini Paul Sharp menyebutnya sebagai *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*. Dalam tipologi yang ketiga ini terdapat pemihakan terhadap suatu isu. Isu atau gagasan yang diangkat dan diperjuangkan ini memiliki sifat universal. Mengingat isu ini sangat relevan dan menjadi kebutuhan bagi banyak orang maka membutuhkan adanya *lobbying* atau kampanye baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu isu atau gagasan yang termasuk dalam gambaran bagi tipe ketiga adalah isu lingkungan. Sharp juga mencontohkan masyarakat Kanada yang mampu menjadi

penghubung jaringan kampanye dan *lobbying* transnasional untuk isu-isu yang termasuk dalam kategori *new agenda*.

Tipologi yang keempat memiliki kemiripan dengan tipe ketiga. Perbedaan dari kedua tipe terakhir ini adalah pada sasarannya. Pada tipe ketiga memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah sedangkan pada tipe keempat mendukung gagasan dengan mendorong terwujudnya tatanan baru. Tatanan baru yang akan diciptakan ini diharapkan lebih akomodatif terhadap sesuatu sesuai dengan gagasan atau ide yang mereka inginkan. Paul Sharp dalam hal ini menyebutnya sebagai *the citizen diplomat as a subverter of transformer of existing policies and/or political arrangements, domestic and/or international*. *Citizen diplomacy* pada tipe keempat ini memiliki peran sebagai pendukung pihak-pihak yang memiliki orientasi (2001). Pihak-pihak tersebut melakukan perubahan atau mendukung terciptanya perubahan terhadap kebijakan atau perencanaan politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Misalnya aktivitas individu atau kelompok individu yang mendukung gerakan atau kebijakan anti-pemerintah seperti kunjungan masyarakat Duluth ke negara-negara yang dikategorikan sebagai “musuh” AS seperti Irak, Serbia, Kuba, USSR (Uni Soviet) ketika masih berdiri, dan Nikaragua. Dari gambaran pelaksanaan diplomat warga tersebut (tipe keempat) menunjukkan bahwa aktivitas warga ditujukan untuk membangun kesadaran transnasional non-negara bukan internasional.

Untuk tipe kelima, diplomat warga yang merupakan aktivitas para warga untuk mewakili dirinya sendiri. Paul Sharp menyebut tipe yang kelima ini sebagai *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*. Tipe yang kelima ini mengacu pada aktivitas individu dengan segala sumber dayanya dan kapasitas pribadinya. Menurut Sharp, ada beberapa alasan mengapa individu mampu bertindak otonom sebagai seorang diplomat. Pertama, adalah kapasitas finansial ekonomi misalnya adalah figur-figur internasional seperti George Soros, Ted Turner, dan Bill Gates. Alasan kedua adalah kepemilikan atas kapasitas moral seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan Jimmy Carter yang karir publiknya membuktikan bahwa kapasitas moral untuk membawa perubahan

internasional. Tipe yang kelima ini dikategorikan sebagai diplomat profesional yang berperan sebagai agen otonom.

Dampak Pelaksanaan Diplomasi Warga di Negara-Negara Berkembang

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai dampak pelaksanaan diplomasi warga di negara-negara berkembang akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kriteria pelaksanaan diplomasi warga dalam aktivitas hubungan luar negeri. Di sini ada tiga kriteria yakni: pertama pelaksanaan diplomasi warga tersebut muncul sebagai wujud partisipasi warga yang difasilitasi oleh pihak lain maupun atas inisiatif sendiri. Pihak yang memfasilitasi tersebut bisa berasal dari negara atau swasta secara sukarela. Inilah yang kemudian dikenal dengan *state-based diplomacy*. Hal ini dapat dicontohkan pada pementasan kesenian daerah yang dilakukan oleh Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia dalam Indonesian Culture Expo 2016 (<http://ppidunia.org> diakses 2 Januari 2017). Penyelenggaraan kegiatan ini digagas oleh persatuan para pelajar Indonesia yang berada di Malaysia namun difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

Selanjutnya aktivitas diplomasi dengan inisiasi secara otonom dari masyarakat merupakan gambaran dari partisipasi warga secara sukarela. Di sini pemerintah tidak memberikan fasilitas terhadap warga yang melakukan diplomasi. Hal ini terlihat pada Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPB) dengan upayanya untuk membangun, melestarikan, mengembangkan jaringan virtual, dan mempublikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai aspek dari budaya Melayu dari seluruh penjuru dunia. BKPB juga melakukan penggalangan solidaritas serta membangun masyarakat Melayu pada tataran global dengan memanfaatkan teknologi internet untuk menggalang solidaritas.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertemukan kembali berbagai komunitas Melayu yang telah melakukan diaspora ke berbagai penjuru dunia sehingga membangkitkan kesadaran dari seluruh keturunan Melayu akan keberadaannya dan untuk mempertahankan eksistensi tersebut melalui akulturasi dengan budaya lokal (Setyasih Harini, 2015). Kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh BKPB ini sekaligus juga memberikan gambaran bahwa aktivitasnya bisa

menjadi instrumen yang mewakili negara dalam melakukan diplomasi. Di sini diplomasi warga bersifat komplementer terhadap diplomasi berbasis negara (*state-based diplomacy*) sebagai kriteria kedua. Sebab, aktivitas BKPBM tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan pada masyarakat akar rumput di negara Malaysia akan persamaan yang ada antara Indonesia dengan negeri jiran tersebut. Kegiatan seperti ini penting sekali mengingat masih rawannya konflik yang tidak terduga dan bisa terjadi sewaktu-waktu antaran Indonesia dan Malaysia sebagai sesama negara serumpun. Perlu diingat bahwa ketegangan diantara kedua negara seperti sumbu yang siap menyala terkait isu perbatasan, pekerja migran Indonesia (TKI) dan budaya. Meskipun kegiatan BKPBM ini belum mampu memengaruhi kebijakan nasional negara Malaysia. Mueller menganggap kondisi seperti ini dengan istilahnya yakni "*The Power of Example*" untuk menggambarkan bahwa perilaku dan tindakan warga akan lebih dipercaya oleh pihak lain daripada perkataan dari seorang ahli sekalipun. Dengan kata lain, Brent M Eastwood, menekankan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh awam sebagai warganegara biasa dapat mendukung keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah (2007). Kriteria ketiga adalah pelaksanaan diplomasi warga tersebut mensyaratkan adanya kesadaran global (*global awareness*). Dalam melaksanakan diplomasi, para warga yang bertindak sebagai pelobi (*citizen diplomats* atau *citizen ambassador*) tidak harus sejak awal telah memiliki kesadaran global sebagaimana yang diharuskan untuk para profesional yang bertindak sebagai diplomat. Kesadaran global yang dimiliki oleh individu yang nantinya berperan sebagai diplomat warga baru muncul ketika mereka telah memahami akan permasalahan global dan mampu bertindak strategis untuk meresponnya. Kesadaran global seperti ini terbentuk melalui pembelajaran internal dari masing-masing individu maupun proses pelatihan khusus yang difasilitasi oleh pihak lain.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia pelaksanaan diplomasi warga tersebut sangat bermanfaat. Manfaat tersebut terkait dengan kondisi dan kompetensi para diplomat yang belum sepenuhnya memiliki latar belakang pendidikan atau keilmuan hubungan internasional. Seperti yang terlihat pada Duta

Besar Indonesia yang bertugas di Kuala Lumpur Malaysia berlatar belakang militer. Dengan latar belakang yang kurang sesuai dengan bidang yang ditangani menjadikan kurang maksimalnya penyelesaian masalah yang muncul dari tugas penting yang mewakili negara. Selain itu dengan semakin banyaknya tantangan dalam hubungan luar negeri yang terkadang berujung pada kemungkinan terjadinya ketegangan diantara dua negara atau lebih maka keterlibatan warga untuk menjalin relasi dengan warga dari negara lain menjadi angin segar. Relasi yang tercipta pada tataran *grassroot* ini seringkali berjalan apa adanya tidak terpengaruh dengan tataran pemerintahan. Sehingga kondisi demikian dapat memengaruhi relasi diantara para warga yang berbeda latar belakang kenegaraan untuk menciptakan kesepahaman dan saling pengertian. Pada tataran selanjutnya relasi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan luar negerinya. Hanya saja perlu diingat bahwa diplomasi warga yang terjadi di negara-negara berkembang khususnya Indonesia belum banyak dilakukan sehingga masyarakat perlu diberi wawasan baru tentang hal ini dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (internet). Selain sosialisasi mengenai pemaksimalan penggunaan teknologi internet, masyarakat juga perlu diberi wawasan dan keterampilan mengenai bahasa asing khususnya bahasa internasional untuk memudahkan terbentuknya relasi. Dan yang terakhir adalah adanya perhatian dan apresiasi positif dari pemerintah akan inisiasi warga untuk melakukan diplomasi baik melalui perdagangan, budaya atau bidang lainnya.

Kesimpulan

Saat ini warga memiliki peluang yang semakin lebar untuk melakukan komunikasi dengan warga negara lain. Peluang seperti ini hendaknya ditindaklanjuti dengan melakukan relasi secara positif guna mendukung pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional dan melindungi keamanan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang melalui pemerintahnya hendaknya lebih memberikan apresiasi dan perhatian tersendiri kepada warga yang telah melakukan diplomasi melalui penambahan fasilitas, bantuan dalam bentuk regulasi dan kemudahan-kemudahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eastwood, Brent M. (2007). *A Note on the New Face of Citizen Diplomacy: Educational City and American Universities in the Middle East*. American Foreign Policy Interests.
- Havermans, Joss. (1999). *Private Professionals for Peace, in People Building Peace: 35 Inspiring Stories from Around the World*. European Centre for Conflict.
- Hoffman, J., and Graham, P. (2006). *Introduction to Political Concepts*. London: Longman
- Insanally, Rudy. (2013). *Multilateral Diplomacy, For Small State*, Guyana South America: Guyenterprise Advertising Agency.
- Mutmainah, Dian, (2014). Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya. Vol. 10 No. 2.
- Odoh, S.I., Nwogbaga, David M.E, (2014). Reflection on the Theory and Practice of Citizen Diplomacy in the Conduct of Nigeria’s Foreign Policy. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. Volume 19, Issue 10, Ver. VIII.
- RN, Michael Z. (2013). Dari Interdependensi ke Globalisasi. Dalam Walter Carlsnaess, Thomas Risse dan Beth Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Sharp, Paul. (2001). Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota, as Internasional Actors. *International Studies Perspectives*. Vol. 2.
- Thompson, Drew, (2005). China’s Soft Power in Africa: From the Beijing Consensus to Health Diplomacy. *China Brief: A Journal of Analysis and Information*, Vol. V No.21.
- <http://ppidunia.org/ice-2016-memperkenalkan-indonesia-lewat-budaya/>